

Tunggakan Pajak 900 Angkot di Kota Depok Capai Rp5 Miliar

DEPOK (IM) - Ratusan angkutan kota (angkot) di Kota Depok, Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir menunggak pajak. Total tunggukannya mencapai Rp5 miliar.

"Tunggakan angkot di Kota Depok tahun 2020, 2021 hingga tahun 2022 mencapai Rp5 miliar," ungkap Kepala Organisasi Angkutan Darat (Keporganda) Kota Depok, Muhammad Hasyim, Minggu (30/10).

Jumat kemarin, katanya pihak Organda Kota Depok dapat surat tagihan dari Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kota Depok. Tagihan sebesar Rp5 miliar. Jumlah itu berasal dari 900 unit angkot. "Ini angka yang signifikan," kata dia.

Hasyim mengungkapkan surat tagihan pajak tersebut telah disampaikan kepada masing-masing pihak baik perusahaan individu pun perusahaan yang berbadan hukum supaya dibayarkan. Dikatakan Organda Kota Depok selalu terima surat dari bagian pajak.

"Tiap tahun kita selalu terima surat tagihan karena Organda induk dari angkot-angkot," tandasnya.

La menjelaskan, seluruh pemilik pajak angkot teridentifikasi sehingga memudahkan kami mengingatkan kepada mereka agar membayar kewajiban tepat waktu agar tidak terbebani denda. "Petugas kami setiap hari menghubungi para pemilik angkot yang menunggak pembayaran pajak angkot," paparnya.

La menjelaskan, pihaknya juga kerap menginformasikan ini kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok selaku penanggung jawab operasional angkot agar aktif menindak angkot-angkot yang tidak membayar kewajibannya. Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang menjadi salah satu kelengkapan kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat diperiksa STNK sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang sah yang di dalamnya tercatat nomor polisi, rangka dan mesin dicabut jika tak bayar pajak. STNK juga memiliki masa periode yang berlaku atau waktu pembayaran pajak baik secara tahunan maupun lima tahunan dibebukan, kemudian angkot dikedan-kan. Namun Dishub Kota Depok tampak loyo. "Dishub juga tampak masa bodo, abai terhadap tanggung jawab selaku manajer penertiban dan pengawasan angkot-angkot," ucapnya.

Hasyim melanjutkan, jika saja Dishub menjalankan otoritasnya yakni melakukan penertiban, pengusaha angkot pasti taat membayar pajak angkotnya dan pajak yang ditarik dari pengusaha angkot bisa dimanfaatkan ke pembangunan infrastruktur Dishub. Salah satunya membangun pusat-pusat parkir, membangun fasilitas penyeberangan sekolah dengan menerapkan zona selamat sekolah. membangun fasilitas pejalan kaki, dan membangun lampu merah yang lingkungan sekolahnya terletak di pinggir jalan raya.

Syarat mengurus pajak kendaraan tahunan, membawa STNK asli dan fotokopi BPKB asli dan fotokopi KTP asli dan fotokopi KTP pemilik sesuai data identitas kendaraan. Sekretaris Dishub Kota Depok Anton Tofani Muharram tidak menampik angkot-angkot di kotanya cukup banyak tunggak pajak.

"Kita akan intensifkan razia-razia bagi angkot-angkot. Jika nanti ada angkot yang melanggar aturan kita tindak sesuai aturan yang berlaku," ungkapnya. • yan

Prostitusi Rawa Malang Jakut Muncul Lagi Usai 'Menghilang'

JAKARTA (IM) - Satpol PP Jakarta Utara melakukan pengecekan ke permukiman dekat kawasan hutan kota Rawa Malang, Cilincing, yang disebut-sebut sebagai lokalisasi selubung. Para pelaku prostitusi, sebut ketua RT setempat, kerap 'kucing-kucingan' dengan petugas.

Ketua RT setempat, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan kegiatan prostitusi di lokasi tersebut masih berjalan. Dia mengatakan pihak prostitusi itu bersembunyi ketika petugas menggerebek lokasi tersebut.

"Masih ada (prostitusi). Jadi mereka ini kucing-kucingan. Jadi ketika ada petugas dari Cilincing, baik dari Satpol PP atau dari polisi, mereka ini sembunyi," kata ketua RT tersebut, ketika dihubungi, kemarin.

Dia mengatakan, beberapa hari terakhir, kegiatan prostitusi kembali berjalan normal. Selain kegiatan prostitusi, ada sejumlah kafe remang-remang memainkan musik yang mengganggu warga sekitar.

"Ya untuk beberapa hari kemarin masih sibuk kegiatan (prostitusi) di dalam," ujarnya.

Dia menyebutkan pihak kepolisian dan Satpol PP rutin melakukan patroli di area prostitusi tersebut. Tetapi waktu patroli yang hanya beberapa saat dan menyebabkan para pelaku prostitusi itu kembali lagi.

"Apakah petugas patroli itu selalu patroli bercokol di situ? Kan sewaktu-waktu datang. Setelah situasi kondusif,

dia balik kanan. Nah, para pengasuh, termasuk pengurus-pengurus (prostitusi), dia beroperasi setelah aparat sudah tidak ada," ujarnya.

Ditutup

Sebelumnya, kepolisian dan Pemkot Jakarta Utara telah menutup area lokalisasi itu. Hal ini merespons keresahan masyarakat.

"Kita sudah kirim tim bersama *stakeholder* setempat. Disampaikan mulai malam ini untuk menutup warung-warungnya dan tidak ada lagi kegiatan serupa," kata Kapolsek Cilincing, Koptol Haris Akhmad saat dihubungi, Senin (26/9) lalu.

Haris mengatakan setidaknya ada 10 warung yang menjadi tempat prostitusi di lokasi. Total, ada puluhan pekerja seks komersial (PSK) yang tersedia di tempat tersebut.

Menurut Haris, para PSK ini akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing setelah prostitusi di Rawa Malang ditutup malam itu. "Total ada 10 warung dan mungkin ada 30-an PSK," katanya.

Para PSK ini pun akan diberi keterampilan sebelum dipulangkan ke kampung halaman.

"Kita akan berkoordinasi dengan kecamatan mengajak serta suku dinas sosial untuk memberi pelatihan kepada para penghuni guna mendapat bekal keterampilan dan para penghuni akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing," katanya. • yan

4|Metropolis

FOTO:ANT



AKSI SOLIDARITAS TRAGEDI KANJURUHAN DI JAKARTA

Sejumlah suporter melakukan aksi damai saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (30/10). Mereka menuntut PSSI untuk bertanggung jawab serta mengusut tuntas Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa.

Anggota DPRD DKI Desak Pemprov Bebaskan Bantaran Kali Pesanggrahan

Saat ini warga Jalan Haji Briti, Kembangan Selatan masih menunggu kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta terkait pembebasan lahan untuk program normalisasi Kali Pesanggrahan. Walaupun beberapa waktu lalu sudah pernah dilakukan sosialisasi tapi hingga saat ini tidak ada kejelasan.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, segera mereal-

isasikan pembebasan lahan bantaran Kali Pesanggrahan, termasuk di Jalan Haji Briti, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.

Menurut anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI itu, setiap musim hujan dan ditambah datangnya air dalam jumlah besar dari hulu, kawasan tersebut kerap diredam banjir.

Hal itu menyebabkan warga was-was karena beberapa rumah warga akhirnya mengalami kerusakan akibat sering tergerus air kali yang meluap. "Saya berharap Pj Gubernur Heru Budi Hartono bisa membuat permasalahan ini menjadi program prioritas," katanya.

Berdasarkan pengecekan di lapangan banyak sekali rumah warga yang retak dan cukup membahayakan pada

saat banjir melanda wilayah tersebut. "Luapan banjir tersebut akan tumpah ruah berdampak sampai ke perempatan lampu merah Puri," kata Kenneth.

Saat ini warga Jalan Haji Briti, Kembangan Selatan masih menunggu kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta terkait pembebasan lahan untuk program normalisasi Kali Pesanggrahan. Walaupun beberapa waktu lalu sudah pernah dilakukan sosialisasi tapi hingga saat ini tidak ada kejelasan.

"Menurut keterangan warga, tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta, sebelumnya sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait uang pengganti pembebasan lahan itu, tetapi tidak ada kelanjutannya lagi hingga saat ini," katanya.

Masyarakat juga saat ini merasa resah dan mempertanyakan nasib mereka yang tidak ada kejelasannya sampai hari ini. Kenneth menjelaskan, trase dan penetapan lokasi di wilayah itu sudah jelas sehingga tinggal ada atau tidak kemauan serius dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam mengeksekusinya.

"Warga yang tinggal di bantaran kali harus segera direlokasi. Karena wilayah tersebut sangat berbahaya untuk bermukim, ditambah banyaknya pondasi rumah warga yang sudah retak dan hancur karena tergerus air kali," katanya.

Hal ini sangat berisiko, rawan longsor dan bisa membahayakan nyawa. Sementara untuk pindah dari lokasi ini, warga sekitar terkendala oleh biaya. "Mereka tidak punya uang untuk pindah dan memulai hidup di wilayah yang baru nanti," kata Kenneth.

Kenneth menyebutkan, warga berharap dengan uang pengganti pembebasan lahan

yang layak dapat membuat mereka memulai hidup baru, tidak dikhawatirkan dengan banjir yang kerap menimpa mereka.

Kenneth mengingatkan, jika ingin mengeksekusi proyek harus secara tuntas dan jangan setengah-setengah. Nasib orang digantung terus-menerus dan warga dibiarkan tertangkap-katung seperti ini.

"Karena itu, saya berharap Pak Pj Gubernur DKI bisa memahami permasalahan ini dan bisa langsung mengeksekusi program ini," katanya.

Dia juga berharap Pj Gubernur bisa mengecek permasalahan di wilayah Haji Briti, Kembangan Selatan, ini untuk melihat secara langsung dan bisa mengambil satu kesimpulan valid.

Ketua IKAL PPARA LXII Lemhannas itu juga menyarankan jika hendak melakukan pembebasan lahan, diharapkan peta trasenya mengikuti aliran sungai dan dilakukan dengan perhitungan yang tepat.

Hal itu mengingat saat sosialisasi sebelumnya, peta trase yang ditunjukkan kepada warga dipotong secara garis lurus. Warga mengkhawatirkan banyak rumah yang seharusnya tidak terkena relokasi malah terkena dampaknya.

Dia berharap kalau bisa peta trase program Kali Pesanggrahan di wilayah Haji Briti, Kembangan Selatan, ini bisa diubah untuk mengikuti aliran sungai saja. "Jangan main potong lurus, karena kalau mengikuti dasar peta trase awal, ada masalah yang jauh dari pinggiran kali ini akan terkena dampak relokasi juga," katanya.

Warga juga sempat mengkhawatirkan hal tersebut dan menyampaikan kepada Kenneth. "Menurut saya harus ada hitung-hitungan yang pas," kata Kenneth. • yan

Komunitas Dog Lover Tuntut Pemprov DKI Cabut Aturan Larangan Bawa Hewan

JAKARTA (IM) - Komunitas Dog Lovers mendatangi *car free day* (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (30/10) pagi. Berjumlah sekitar enam orang, mereka membawa anjing masing-masing.

Pengggagas CFD Dog Lovers, Azas Tigor Naing-golan mengatakan, kedatangan komunitasnya bermaksud meminta agar Pemerintah Provinsi DKI mencabut larangan membawa hewan saat CFD. "Kami minta itu dicabut larangan membawa hewan," ujar Azas di depan Pos Polisi Bundaran HI, Minggu pagi.

Azas menyebutkan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Dinas Perhubungan DKI terkait permintaan itu. "(Dishub) mau ngobrol dulu sama (stakeholder) CFD. Kami sudah bersurat dua minggu lalu," kata Azas.

Adapun, Dishub DKI mengeluarkan larangan mem-

bawa hewan peliharaan saat berkunjung ke CFD melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor: e-0077 Tahun 2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan HBKB (hari bebas kendaraan bermotor). Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, hal itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Tim Kerja HBKB Provinsi DKI Jakarta dan masukan masyarakat yang berkegiatan di sana.

"Ketentuan tersebut merupakan hasil pembahasan Tim Kerja HBKB yang melibatkan sejumlah pihak terkait," ujar Syafrin, Senin (10/10) lalu.

Adapun 15 jenis pelanggaran yang bakal ditindaklanjuti saat HBKB: Berjalan di zona merah, Merokok dan atau *nu-jing*, Membuang sampah sembarangan, Melakukan tindakan kriminal dan atau tindakan asusila, Membawa hewan peliharaan, Melakukan kegiatan

politik atau berbau SARA, Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pergerakan pengunjung HBKB, Melakukan kegiatan dan menggunakan alat yang dapat yang dapat menimbulkan polusi udara, Memasukkan dan atau memarkirkan kendaraan di dalam koridor HBKB, Mengoperasikan kendaraan bermotor ke area HBKB, Jual-beli produk dan atau jasa (mengamen/mengemis/meminta sumbangan), Tanpa izin melakukan dan atau menyelenggarakan pertunjukan musik, *talkshow*, *gimmick*, dan sejenisnya, Tanpa izin melakukan dan atau menyelenggarakan hal yang melibatkan sponsorship, media promosi dalam bentuk *flyering*, *leaflet*, brosur, dan sejenisnya, Menyenggarakan segala kegiatan yang mendukung kegiatan industri otomotif dan rokok, Memperdengarkan musik dengan suara keras melalui speaker yang dibawa/dipasang pada sepeda. • yan

Dani Ramdan Tekankan Penyelenggara Pemilu Harus Netral Independen Profesional



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (kiri) saat Pelantikan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Bekasi di Hotel Sunerra Antero, Cikarang, Jum'at (28/10).

CIKARANG SELATAN (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan, menekankan para Penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mempunyai karakteristik Netral Independen Profesional (NIP) pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Pelantikan Anggota Pa-

nitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Bekasi di Hotel Sunerra Antero Cikarang Utara, Jumat (28/10).

"Tiga karakter yang harus dimiliki oleh para penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, yakni Netral Independen Profesional (NIP). Karena dengan 3 prinsip ini, insya Allah penyelenggaraan pemilu akan sukses dan membawa kebaikan," jelas Dani

dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Sabtu (29/10).

Selain itu, dirinya juga meminta kepada anggota Panwaslu yang baru saja dilantik, agar bisa melaksanakan dan memegang teguh fakta integritas yang sudah ditandatangani bersama.

"Harus tetap mengingat fakta integritas yang sudah ditandatangani, karena semua yang menjadi acuan tugas ada di fakta integritas tersebut," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Syaiful Bahri mengatakan, anggota Panwaslu yang sudah dilantik tentunya akan langsung bekerja membantu Bawaslu di tingkat kecamatan, agar dapat mengawal pemilu yang demokratis di tahun 2024.

"Saya ucapkan selamat kepada bapak/ibu yang sudah dilantik, semoga bapak/ibu dapat menjalankan amanat dan ikrar sesuai fakta integritas tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengawal pemilu yang demokratis di tahun 2024," harpnya.

Sebagai informasi, anggota Panwaslu Kecamatan yang dilantik sebanyak 69 orang dari 23 kecamatan, dengan melalui serangkaian proses penjurangan secara ketat dan terbuka, yakni mulai pendaf-

aran, seleksi berkas, tes tertulis, dan wawancara, hingga pengumuman hasil.

Para anggota Panwaslu yang dilantik ini akan mulai bertugas pada tanggal 1 November 2022 mendatang, dengan agenda pengawasan data pemilu. • mdl

PENGUMUMAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa PT. Adil Berkat Sentosa, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") akan meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan penyertaan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut akan dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada Pemegang Saham menjadi saham Perseroan dengan cara pengaluan saham baru dalam simpanan sejumlah 29.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- per lembar saham. Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 PP No. 15 tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 31 Oktober 2022
PT. Adil Berkat Sentosa
Direksi

PENGUMUMAN

Para Pemegang Saham PT PUTRA PILE INDAH ("Perseroan") bermaksud untuk menjual sahamnya, dengan keterangan bahwa THE FERRO COMPANY PTE. LTD. bermaksud untuk mengalihkan sahamnya kepada PT PUTRA KARYA INTERNASIONAL. Pengalihan saham tersebut mengakibatkan akuisisi saham Perseroan secara langsung melalui pemegang saham berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Akuisisi akan dilaksanakan dengan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap akuisisi, tidak lebih dari 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini, keberatan disampaikan secara tertulis dengan menjelaskan alasan berikut bukti pendukung kepada Perseroan di:

Kawasan Industri BIE Blok C 5 No. 1 Lippo Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 127 Ayat 2 dan Ayat 8 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas

Bekasi, 31 Oktober 2022
Direksi
PT PUTRA PILE INDAH

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 9

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 9 yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 4 Oktober 2022, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 9, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 9 sebagaimana termaktub dalam akta Addendum REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 9.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Pernyataan REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 9 serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA

reksa dana

Jakarta, 31 Oktober 2022

Manajer Investasi

REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 9

PT SYAILENDRA CAPITAL

bertizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan